

Analisis Strategi Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Melalui SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat

Salsabila, Zuhrizal Fadhly, Cut Asmaul Husna
Universitas Teuku Umar, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 19 Mei 2024
Accepted : 17 Juni 2024
Available Online : 27 Juni 2024

KEYWORDS

Administrative Reform, Public Services,
Bureaucracy, Implementation

CORRESPONDENSI

Nama : Zuhrizal Fadhly
Email : zuhrizalfadhly@utu.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT

Administrative reform is an increase in the ability of bureaucrats to be able to make normative policies a reality in the field. This research aims to analyze how the service reform strategy is implemented at the West Aceh District Dukcapil Office through the online-based SIAK Population Administration Information System (Population Administration Information System). Apart from that, in its implementation there are also several weaknesses and obstacles faced. The service renewal program which is the main focus in this research, namely using the SIAK system in West Aceh District, is studied in depth. The method used in this research is descriptive qualitative research and data analysis using observation, interviews, and documentation. As well as data analysis techniques using data reduction, presentation of data and conclusions. This is measured from the 2019 Wijaya theory using 4 indicators, namely Value Transformation, Organizational Arrangement and Work Procedures, Management System Strengthening, and Increasing HR Competency. The results of this research are that, the SIAK system in West Aceh has been implemented, However, its implementation is not yet optimal because it cannot reach the community as a whole.

Pendahuluan

Reformasi merupakan bagian dari rancangan untuk memperbaharui tatanan pemerintahan menuju perbaikan karena tatanan yang tidak diperlukan menuju tatanan yang lebih bagus lagi dan membutuhkan proses di dalamnya (Marzuki, 2016). Rancangan reformasi bermula dari adanya sebab akibat seperti kesenjangan yang luas antara aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kenyataan yang ada (Suryono, 2019). Hal yang perlu kita ketahui, bagian dari rancangan dalam sekejap mata tidak akan bisa terjadi dalam perubahan, rancangan membutuhkan proses dalam waktu yang cukup lama, semua tergantung pada sebab yang mempengaruhi proses tersebut. Sebab-sebab yang akan mempengaruhi proses ini, yaitu adanya kesadaran sosial atas kewajibannya, ide dan konsep pada perubahan ini dengan adanya pemimpin yang dapat mengarahkan proses rancangan perubahan supaya masyarakat mengerti dan paham (Karmanis & Karjono, 2020).

Reformasi administrasi sendiri dilaksanakan dengan adanya kemampuan secara bertahap pada aparatur sebagai perwujudan yang berpegang teguh pada norma menjadi sesuai dengan kenyataan yang ada (Meutia, 2017). Perbaikan dapat dilaksanakan dengan cara memperbaiki lembaga sosial, proses pelayanan yang diperbaiki dan ditingkatkannya

keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian prosedur yang telah diperbaiki dan cara pelaksanaan dalam pengolahan hasil kekayaan negara dengan cara menjadikan masyarakat paling utama, keselamatan kekayaan negara dan hukum yang benar (Siti, 2022). Perubahan administrasi berhubungan erat dengan definisi strategi, karena pada dasarnya reformasi administrasi adalah kegiatan dengan tujuan memperbaiki segala kegiatan yang menyangkut pelaksanaan pada kegiatan administrasi dari permasalahan yang dihadapi dan dari penyakit birokrasi dimana pihak penyelenggara sering mempersulit pihak yang dilayani daripada mempermudahnya. Semua tergantung pada kreatifitas dari pimpinan masing-masing sebagai wujud dedikasi, dan moralitas aparatur (Zauhar, 2007).

Penyediaan pelayanan publik, yakni pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terus berupaya membagikan layanan terbaik guna untuk meningkatkan taraf layanan publik (Sawir, 2020). Di samping itu kepuasan menjadi tolak ukur yang diberikan kepada masyarakat terhadap berhasilnya pelayanan publik oleh penyedia pelayanan sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Setiap warga negara memerlukan pelayanan publik yang efisien dan efektif serta responsif terhadap keluhan warganya. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto memastikan bahwa beragam strategi percepatan telah disiapkan sebagai jawaban dari pekerjaan rumah tersebut (HUMAS MENPANRB, 2024).

Strategi percepatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui reformasi administrasi pelayanan publik (Haning, 2018), seperti yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Aceh Barat, hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Aceh Barat masih menemui permasalahan yang sampai saat ini terus dilakukan perbaikan, maka dalam memperbaiki pelayanan publik diperlukan reformasi administrasi pelayanan publik. Perencanaan strategis di samping mengagendakan aktivitas pembangunan, harus pula melingkupi program-program yang mendukung dan menjamin layanan masyarakat dapat dilakukan secara baik dan terarah, di antaranya adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas pemerintahan, sehingga memerlukan perbaikan atau strategi reformasi pada administrasi kependudukan (Iqrom, 2013).

Pendaftaran pada penduduk merupakan salah satu hal yang dapat membantu pekerjaan seseorang untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan seperti halnya pemerintah yang mengeluarkan sebuah peraturan melalui rancangan terdahulu yang bernama SIMDUK atau Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang sudah ada sejak tahun 1996. Pada perkembangan SIMDUK diganti oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIMDUK atau sekarang lebih dikenal dengan SIAK ini merupakan suatu peraturan yang ditetapkan pada daerah/kota, dan dimaksudkan untuk dapat menangani perihal kependudukan melalui perubahan yang ada (Muliati, 2019). SIAK adalah suatu sistem yang dikelola datanya kependudukan seperti pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan gambaran tentang kependudukan. Sistem atau aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola data

kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, dan juga karena didasarkan pada basis internet dan dikumpulkan di satu titik, yaitu *Internet Data Center* (Suldar, 2021).

Kebutuhan akan sistem manajemen yang membantu produktivitas kerja pemerintah mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan transformasi melalui teknologi jaringan komunikasi dan informasi (Holle, 2011). Teknologi informasi memberikan peluang bagi pengakses. Maka instansi pemerintah berusaha untuk mereformasi pelayanan publik. Salah satu caranya dengan memasukkan teknologi informasi ke dalam dana administrasi pemerintah dengan tujuan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam layanan pemerintah.

Di Indonesia, administrasi kependudukan diatur melalui UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tujuan dari adanya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut antara lain adalah; Sahnya identitas memberikan kepastian pada hukum untuk dokumen penduduk pada setiap peristiwa kependudukan dan kejadian utama yang dialami penduduk yang memberikan perlindungan atas hak untuk status sipil penduduk, menyiapkan data serta informasi kependudukan secara menyeluruh terhadap pendaftaran penduduk dan catatan sipil di tingkat-tingkat yang terpercaya, mutakhir, lengkap dan diakses secara mudah hingga menjadi pedoman rumusan kebijakan dan pembangunan dengan dukungan infrastruktur, SDM, tingkat sambungan dan pengguna IT, anggaran dan dana serta perangkat hukum yang semakin melengkapi IT menjadi satuan untuk penerapan birokrasi pemerintahan (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013). Akan tetapi pelaksanaan tersebut pada kenyataannya mengalami banyak kendala pada saat dilakukan di lapangan pada sistem pengelolaan data kependudukan sistem SIAK, seperti banyaknya pemalsuan identitas yang disebabkan karena pendataan mengenai penduduk tidak lengkap. Di samping itu, masih banyak ditemukan perilaku diskriminatif yang membedakan antara keturunan, suku dan agama.

SIAK menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara *online* maka kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain: hasil perhitungan data pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya (Jai *et al.*, 2016). Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi reformasi administrasi pelayanan publik melalui SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan metode kualitatif dalam pendekatan deskriptif, peneliti melakukan perencanaan terhadap objek

penelitian dengan cara mencari informasi yang tepat dengan pandangan dari peneliti dan data yang diperoleh dapat dikembangkan berdasarkan dengan interaksi yang ada di lapangan dengan cara melakukan wawancara (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, informan dipilih sesuai dengan bidangnya sesuai tema penelitian, di antaranya kepala Disdukcapil, Kepala bidang SIAK Disdukcapil, dan masyarakat di Aceh Barat.

Data diperoleh melalui data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, makalah, artikel, buku-buku, struktur organisasi, dan lainnya sebagai petunjuk yang relevan terhadap masalah penelitian. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui teknik analisa data seperti tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan akhir data (Sugiyono, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Strategi Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Aceh Barat

Reformasi Administrasi Pelayanan Publik adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki struktur birokrasi, prosedur birokrasi dan perilaku birokrat (Ritonga, 2019). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Wibowo & Kertati, 2022). Berdasarkan kedua konsep tersebut, pada hakikatnya sering berhubungan karena reformasi bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Transformasi Nilai

Transformasi nilai adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk tetap melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, agar budaya tersebut dapat menjawab kompleksitas permasalahan yang dialami oleh masyarakat (Yunus, 2013).

Berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) merupakan sebuah aplikasi yang dirancang oleh Kementerian pada tahun 2006 tepatnya setelah Tsunami yang melanda Provinsi Aceh, difungsikan untuk meregistrasi data penduduk supaya menggunakan teknologi. SIAK diterapkan dan diimplementasikan pertama kali di Aceh sebagai uji coba untuk mendata penduduk yang meninggal dikarenakan tsunami. SIAK berisikan data penduduk yang lengkap, penting dan dijaga kerahasiaannya, karena data tersebut harus dilindungi.

Pada transformasi nilai ini terdapat Visi dan Misi yang diterapkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Bupati dan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat periode 2017-2022 tentang administrasi kependudukan. Visi: "Terwujudnya Aceh Barat yang Islami dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel, dan terintegritas".

Misi :

1. Mengembalikan kabupaten Aceh Barat yang syar'i dan mewujudkan pemerintah Aceh Barat yang bersih.

2. Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945 dan MoU Helsinki serta Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
3. Pembangunan pada perekonomian masyarakat yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan.
4. Peningkatan pada kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (Honorar) dan Tengku Dayah.
5. Mengembalikan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni budaya, adat-istiadat serta olah raga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal).
6. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan Nasional.
7. Pemberi layanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta peningkatan SDM di bidang kesehatan.
8. Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat.

Menurut hasil dari observasi lapangan mengenai transformasi nilai yang sudah sesuai dengan visi dan misi Peraturan Bupati Aceh Barat periode 2017-2022 tentang administrasi kependudukan. Visi yang dimaksudkan menjadikan pelayanan dengan transparan. Transparansi yang dimaksud ialah adanya keterbukaan informasi antara aparatur yang bekerja dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tidak terjadinya miskomunikasi antara aparatur dan masyarakat. Kredibel ialah dapat dipercaya, akuntabel yang merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan, dan terintegritas yakni penyatuan dalam sistem kerja, kerja sama sesama aparatur dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan aktivitas guna meningkatkan kinerja pegawai dinas.

Sedangkan misi pada Disdukcapil, dimana peneliti mendapat jawaban dari hasil yang telah diteliti di lapangan, misi yang diterapkan pada dinas tersebut berkenaan pada pembangunan guna mensejahterakan masyarakat Aceh dengan nuansa Islami, dengan terteranya visi dan misi maka dapat memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, visi dan misi dari sebuah perusahaan sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dalam bekerja dan mewujudkan tujuan atau visi dari perangkat daerah.

SOP dalam aplikasi SIAK tidak hanya berdasarkan peraturan, tetapi juga memiliki aturan internal yang sudah ada sejak awal pembuatan pada tahun 2008, dan kemudian direvisi pada tanggal 1 Juni 2018, dengan revisi terakhir dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022, nomor revisi 470/449.6/2022. SOP dalam aplikasi SIAK mencakup prosedur untuk pembuatan atau perubahan data-data seperti KTP, KK, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan sebagainya.

2. Penataan Organisasi Dan Tata Kerja

Penataan organisasi dan tata kerja adalah proses penetapan organisasi baru, penyempurnaan nomenklatur, literatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselonisasi, perubahan lokasi dan wilayah kerja serta penghapusan organisasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas (Nurhadi, 2023). Gambar 1 di bawah ini adalah potret struktur organisasi SIAK.



Gambar 1. Struktur Organisasi SIAK

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa struktur dan tata kerja sistem SIAK disetujui dan ditandatangani oleh kepala dinas. Sedangkan kabid SIAK menjalankan dan mengakses aplikasi SIAK bersama dengan kepala seksi dan keanggotaannya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di lapangan dapat kita ketahui bahwa sistem SIAK merupakan dapur atau tahap akhir dari pelaksanaan administrasi pelayanan, dimulai dari mengambil nomor antrian oleh masyarakat yang hendak membuat KTP, KK, Akta kelahiran, akta kematian dan lain sebagainya. Data yang terkumpul kemudian diproses hingga selesai dengan kurun waktu yang singkat hingga masyarakat tidak perlu menunggu lama sesuai SOP yang diterapkan.

Pada penataan organisasi pada struktur organisasi pada penataan tata kerja, tidak ada penataan ulang kerja karena pegawai bekerja sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai struktur organisasinya. Kepala Dinas, kabid pelayanan pendaftaran penduduk, kabid pelayanan dan pencatatan sipil, kabid PIAK dan pemanfaatan data melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Dimana setiap kepala bidang mempunyai karyawan pada bidang yang telah ditetapkan pada bagian bidang yang ada sesuai dengan kinerja pegawai.

3. Pematapan Sistem Manajemen

Berdasarkan Organisasi Strandardisasi Internasional (ISO), sistem manajemen adalah suatu metode yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengelola berbagai bagian yang terkait dengan bisnis agar bisa mencapai tujuan (Anggusti *et al.*, 2021).

Dari hasil observasi dan wawancara pada pematapan sistem manajemen tentang pelaksanaan fungsi dari sistem SIAK adalah sebagai media penyimpanan yang harus dilindungi dan dijaga keabsahannya karna sistem SIAK adalah privasi yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiaan didalamnya. Sistem SIAK ini juga diterapkan dengan upaya guna melindungi data apabila terjadi bencana data yang tersimpan di aplikasi SIAK terjamin keamanan karna data yang ada di aplikai SIAK sudah di recover atau tersimpan di batam. Berikut pada gambar 2 di bawah ini adalah visualisasi sistem SIAK.



Gambar 2. visualisasi sistem SIAK
Sumber : siakmaster-WordPress.com

Sistem SIAK sendiri hanya bisa diakses oleh seseorang atau beberapa orang yang bisa mengakses aplikasi seperti Kabid bagian SIAK, untuk masyarakat sendiri tidak dapat mengakses aplikasi SIAK namun mereka ketika mau membuat KK atau KTP yang lain sebagainya mereka dapat melakukan secara via online baik itu whatshapp, instagram dan lain sebagainya. Layanan yang dilakukan melalui online sama dengan layanan yang dilakukan dengan datang langsung ke dinas kependudukan yang langsung diproses ke aplikasi SIAK. Namun disini perlu dilakukannya sosialisasi agar masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Barat dapat mengetahui, selain datang ke Dinas untuk membuat data seperti KK atau KTP juga bisa dilakukan secara online untuk memudahkan mereka yang memerlukan data dengan cepat tanpa perlu memikirkan waktu dan tempat yang ditempuh sangat jauh.

Pelaksanaan fungsi sistem SIAK yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil aceh barat juga sudah berjalan dengan baik dan benar, namun sesekali ditemukan hambatan dalam prosesnya seperti keadaan jaringan yang membuat aparatur terhambat dalam proses kerjanya.

4. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

Standar kompetensi SDM aparatur adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu di bidang pengelolaan, perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, esistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan (Arifin, 2013).

Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan di lapangan para pegawai sudah bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan juga saling membantu bidang lainnya karena pegawai bekerja sangat baik, banyak waktu yang dihabiskan dalam melayani masyarakat yang padahal upah atau gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka kerjakan, dikarenakan banyak dari mereka masih bekerja honorer.

Peningkatan kompetensi SDM dengan adanya sistem SIAK dapat mengembangkan kemampuan dan standar yang ada pada dinas kependudukan dapat meningkat dan berinovasi menjadi lebih bagus dan juga dengan adanya aplikasi SIAK dapat membantu apabila data yang di luar dari aplikasi SIAK terhapus maka yang memegang aplikasi SIAK dapat melihat datanya kembali di aplikasi SIAK. Masyarakat juga puas terhadap pelayanan yang diberikan dan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa lama dalam menunggu antrian pada saat pembuatan KK, KTP dan lain sebagainya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di lapangan mengenai Analisis Strategi Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, terdapat empat indikator, yaitu transformasi nilai, penataan organisasi dan tata kerja, pemantapan sistem manajemen, dan peningkatan kompetensi SDM aparatur. Transformasi nilai dalam sistem SIAK, yang dirancang oleh Kementrian pada tahun 2006 setelah Tsunami, bertujuan untuk mendata penduduk menggunakan teknologi. Visi dan Misi diterapkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Bupati dan SOP dengan nomor 470/449.6/2022.

Penataan organisasi dan tata kerja pada sistem SIAK melibatkan struktur organisasi dan penataan tata kerja yang telah terstandarisasi, memungkinkan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Pemantapan Sistem Manajemen melalui SIAK menjaga keamanan data dalam situasi darurat dan memfasilitasi akses *online* bagi masyarakat. Namun, sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara efektif. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui SIAK membantu pengembangan kemampuan dan efisiensi dalam pelayanan, meskipun beberapa masyarakat mengeluhkan waktu tunggu yang lama.

Daftar Pustaka

- Anggusti, M., Toni, N., & Chanaka, J. (2021). *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Teori dan Praktik)*. Merdeka Kreasi Group.
- Arifin, N. (2013). *Manajemen sumberdaya manusia: Teori dan kasus*. Unisnu Press.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25–37.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Sasi*, 17(3), 21–30.
- HUMAS MENPANRB. (2024). *Kementerian PANRB Pandu Akselerasi Reformasi Birokrasi pada 145 Pemerintah Daerah*. Menpan. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-pandu-akselerasi-reformasi-birokrasi-pada-145-pemerintah-daerah>
- Iqrom, P. (2013). *Reformasi Birokrasi di Nusantara*. Universitas Brawijaya Press.
- Jai, S. A., Setyawan, D., & Adiwidjaja, I. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(1).
- Karmanis, M., & Karjono, S. T. (2020). *Perkembangan Teori Dan Reformasi Administrasi*. CV. Pilar Nusantara.
- Marzuki. (2016). Reformasi birokrasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 11–11.
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi administrasi publik*.
- Muliati, S. (2019). *Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurhadi, H. (2023). *Reformasi Birokrasi Tingkat Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- Ritonga, A. R. (2019). *Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara*. Universitas Sumatera Utara.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Siti, M. (2022). *Buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.
- Sugiyono. (2009). *Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suldar, N. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep= Effectiveness of*

Implementation Population Administration Information System in Population and Civil Registration Agenc. Universitas Hasanuddin.

Suryono, A. (2019). *Teori dan strategi perubahan sosial.* Bumi Aksara.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, (2013).

Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 01–12.

Yunus, R. (2013). Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1), 67–79.

Zauhar, S. (2007). *Reformasi Administrasi.* Bumi Aksara.